

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rusadi¹, Reno Affrian², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: gotiersadi@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah yang terletak di wilayah Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menemui berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan, seperti pemanfaatan dana yang tidak sejalan dengan petunjuk teknis, keterlambatan pencairan, serta jumlah dana yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji manajemen pengelolaan serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Pendekatan penelitian ini bersifat *qualitative descriptive*, dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen sebagai bahan pendukung. Subjek penelitian terdiri dari 10 individu yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga proses, yaitu penyaringan informasi, pemaparan hasil, dan penyusunan kesimpulan. Temuan dari penelitian menunjukkan tata kelola BOS di madrasah tersebut belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan, dilihat dari aspek pengelolaan dana, pelaksanaan pembiayaan, serta proses peninjauan. Faktor pendorong adalah terjalinnya komunikasi yang sinergis antara madrasah dan pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Sementara hambatannya berasal dari penyusunan RKAS yang belum seluruhnya terealisasi karena terbatasnya dana serta lemahnya pengawasan, baik dari kepala madrasah maupun dari pihak eksternal seperti Kantor Kementerian Agama.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana, Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRACT

The management of school operational assistance (BOS) at Nurul Hidayah Islamic Junior High School, South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency faces various challenges in fund management, such as the use of funds not in accordance with technical guidelines, delays in fund disbursement and insufficient funds received. This study aims to determine waste management and the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and supporting documentation. The research sample consisted of 10 respondents selected using a purposive sampling method. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing final conclusions. The results of this study indicate that the management of school operational assistance (BOS) at Nurul Hidayah Islamic Junior High School, South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is not optimal, this is seen from the aspects of financial planning, budget implementation and evaluation. Supporting factors include good coordination between the madrasah and internal and external parties, while inhibiting factors include insufficient funding and inadequate supervision by the madrasah principal. Supervision refers to actions or activities carried out by external parties, such as the Ministry of Religious Affairs, and particularly by the madrasah principal.

Keywords: Management, Funds, School Operational Assistance

PENDAHULUAN

Secara yuridis, sistem pendidikan nasional di Indonesia telah diatur dalam pembukaan UUD 1945, dengan inti pernyataan utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ungkapan tersebut menegaskan pendidikan merupakan salah satu sasaran utama dan aspirasi nasional. Banyak elemen yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ini, sebagaimana diperkuat dalam amandemen UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, berkewajiban menempuh pendidikan dasar, dan negara berkewajiban untuk menanggung biayanya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melaksanakan kebijakan pendidikan dasar bagi penduduk berusia 7–15 tahun melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), mencakup jenjang SD/ sederajat hingga SMP/ sederajat.

Pendidikan dilihat sebagai alat strategis dalam meningkatkan kualitas manusia suatu bangsa. Negara yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan akan terlihat dari pencapaian belajar masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kapasitas peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan luas, terampil, penuh ide, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi pendidikan secara nasional adalah membentuk potensi dan karakter, serta membangun peradaban bangsa yang unggul sebagai upaya mewujudkan kecerdasan kolektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, semua anak usia tujuh hingga lima belas tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Dalam pasal 34 ayat 2 dinyatakan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memastikan terselenggaranya program wajib belajar minimal di tingkat dasar tanpa pungutan biaya, dan ayat 3 menegaskan pendidikan merupakan amanah negara yang dijalankan oleh institusi pendidikan (sekolah). Implikasi dari mandat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban menyediakan akses pendidikan bagi seluruh pelajar pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs), termasuk satuan pendidikan sepadan lainnya. Dalam hal ini, Kementerian Agama yang mengelola pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanat regulasi tersebut.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pemerintah pada tahun 2005 meluncurkan program pendanaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menanggung pembiayaan operasional nonpersonalia bagi jenjang pendidikan dasar dalam rangka mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun. Seluruh satuan pendidikan seperti SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, serta SMA/SMALB/SMK/MA yang memperoleh dana BOS diwajibkan untuk menghapuskan segala bentuk pungutan kepada peserta didik terkait biaya

operasional sekolah, termasuk membebaskan siswa dari keluarga tidak mampu dari segala bentuk pembayaran, serta mengurangi beban finansial operasional baik di institusi negeri maupun swasta. Mengacu pada prosedur yang ditetapkan, pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara efisien dan terarah, agar tujuan awal yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat.

Pelaksanaan program BOS akan berjalan secara optimal jika diimplementasikan sesuai dengan petunjuk teknis (technical guidelines) yang berlaku, sehingga pemanfaatannya benar-benar mengacu pada ketentuan pembiayaan nonpersonalia. Alokasi dana BOS juga seharusnya menyesuaikan dengan unsur pembiayaan yang telah diuraikan ke dalam aktivitas-aktivitas tertentu beserta besaran dana yang dialokasikan untuk tiap kegiatan tersebut. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap siswa kurang mampu akan memberikan dampak signifikan jika sekolah dapat mengaplikasikan program ini dengan benar.

Berdasarkan hasil temuan awal melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah yang berlokasi di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni:

1. Di lapangan, penggunaan dana BOS oleh pihak madrasah belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan (juknis) yang telah ditetapkan.
2. Proses pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu menyebabkan tertundanya kegiatan operasional yang memerlukan biaya, sehingga aktivitas sekolah menjadi tidak berjalan maksimal.
3. Terbatasnya jumlah peserta didik di sekolah ini menyebabkan jumlah dana BOS yang diterima juga minim, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sepenuhnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

METODE

Penulis memanfaatkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam studi ini. Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan langsung, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari 10 informan. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan setelah data terkumpul.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga subvariabel pengelolaan yang fokus pada Teori Pengelolaan Keuangan menurut E. Mulyasa oleh Sri Minarti (2017: 216) adapun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut :

A. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kota Raja

a. Perencanaan Finansial

Perencanaan dalam konteks ini dipahami sebagai suatu rangkaian proses rasional yang terstruktur untuk menentukan langkah-langkah aktivitas guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Sumber Pendapatan

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan pengelolaan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah optimal dari sisi penerimaan pendanaan. Hal ini terlihat dari ketergantungan penuh terhadap dana BOS dari pemerintah sebagai satu-satunya sumber pembiayaan operasional madrasah, tanpa adanya alternatif pendanaan lain yang dirancang atau dijalankan

2. Rencana Pengeluaran

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis juga menyimpulkan dari segi perencanaan belanja, pengelolaan BOS di madrasah ini telah berjalan secara efektif. Hal tersebut dibuktikan melalui penyusunan rencana anggaran pengeluaran yang mengacu pada RKAS yang telah disahkan dan dibahas bersama dalam forum rapat, serta penggunaan dana BOS yang diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan fasilitas, pengembangan kelembagaan, pembayaran upah tenaga pendidik, dan kegiatan akademik lainnya.

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menarik simpulan tata kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditinjau dari indikator Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini terjadi akibat terbatasnya jumlah dana BOS yang diterima, sehingga berbagai kebutuhan krusial madrasah seperti pembayaran upah guru tidak tetap dan

pelaksanaan program yang telah dirancang dalam RKAS tidak dapat dijalankan sepenuhnya sesuai dengan rancangan yang telah disahkan

b. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan keuangan mengacu pada rencana yang telah dirumuskan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengikuti prinsip ketepatan, kebermanfaatan, serta penggunaan sumber daya secara efisien.

1. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam aspek pelaksanaan anggaran menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini tercermin dari aktivitas dan proses penyaluran dana yang dilakukan secara sistematis dan dijalankan oleh Tim BOS serta direalisasikan berdasarkan anggaran yang tersedia, dengan pelaksanaan di bawah kendali Kepala Madrasah.

2. Penerimaan Sumber Dana Pemerintah

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan pengelolaan BOS di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam indikator penerimaan dana dari pemerintah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kenyataan madrasah hanya menerima dana dari program BOS yang bersumber dari pemerintah pusat tanpa tambahan dari anggaran daerah seperti BOSDA. BOSDA sendiri hanya ditujukan untuk sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan, sementara madrasah termasuk dalam kewenangan Kementerian Agama. Dana BOS tersebut dikelola secara optimal dan berdasarkan *petunjuk teknis* (juknis), serta disesuaikan dengan *Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah* (RKAM) yang disusun melalui musyawarah internal. Hal ini mencerminkan komitmen madrasah dalam mengelola anggaran secara efisien demi mendukung operasional serta proses pembelajaran.

3. Pengeluaran Dana

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari indikator pengeluaran dana belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah dana yang diterima dari

pemerintah yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam anggaran. Akibatnya, terdapat beberapa komponen pembiayaan yang harus dikurangi, ditunda, bahkan tidak dapat direalisasikan sama sekali. Kebutuhan rutin seperti pembayaran gaji guru honorer, biaya listrik, dan air sering kali tidak dapat dipenuhi tepat waktu dan harus ditalangi terlebih dahulu, salah satunya dengan dana pribadi dari kepala madrasah. Selain itu, adanya pengeluaran mendadak semakin memperbesar kesenjangan antara pengeluaran aktual dan rencana anggaran (RKAM). Kondisi ini menunjukkan meskipun pengelolaan dilakukan dengan penyesuaian, namun keterbatasan dana masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rencana anggaran secara maksimal.

c. Evaluasi

Tanggung jawab atas pemanfaatan dana dan pelaksanaan evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

1. Pengawasan

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan pengawasan terhadap pengelolaan BOS di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kepala Madrasah sebagai pimpinan institusi memang melaksanakan pengawasan internal, namun terbatas pada pengecekan laporan keuangan secara periodik tanpa diikuti oleh pengawasan lapangan secara langsung, seperti inspeksi mendadak. Sementara itu, kontrol dari pihak eksternal seperti Kementerian Agama tingkat kabupaten maupun provinsi umumnya hanya dilakukan apabila terdapat laporan atau indikasi yang memerlukan penelusuran lanjutan. Ketiadaan pemantauan langsung secara konsisten dari kedua pihak menyebabkan sebagian pendidik dan tenaga kependidikan menilai sistem pengawasan terhadap dana BOS masih perlu diperkuat

2. Proses Evaluasi

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari indikator proses evaluasi sudah optimal. Hal ini dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dan melibatkan pihak eksternal seperti Kementerian Agama.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1. Madrasah Menjalani Koordinasi Yang Baik Dengan Pihak Internal Maupun Eksternal

Dari temuan yang dihimpun lewat wawancara dan pengamatan langsung, penulis menyimpulkan aspek yang mendukung pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah yang terletak di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hul adalah koordinasi dalam pengelolaan dana BOS telah berjalan dengan baik, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, komunikasi antar unsur madrasah seperti kepala madrasah, wakil kepala, bendahara, guru, dan staf berlangsung secara terbuka dan partisipatif dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi program. Sementara itu, secara eksternal, madrasah secara rutin berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama dan pengawas madrasah untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan aturan yang berlaku.

b. Faktor Penghambat

1. Perencanaan yang disusun pada RKAS belum sepenuhnya terealisasi karena dana yang didapat tidak mencukupi

Dari temuan dari wawancara serta pengamatan, penulis menyimpulkan Faktor Penghambat Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lambatnya pencairan dan terbatasnya jumlah dana BOS yang diterima, yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Selain itu, ditemukan pula kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan dana, tidak tersedianya dana cadangan, serta belum optimalnya strategi perencanaan keuangan turut memperburuk situasi.

2. Pengawasan dari kepala madrasah masih kurang baik, pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar seperti kantor kementrian Agama terutama oleh kepala madrasah itu sendiri.

Dari temuan yang dihimpun lewat wawancara dan pengamatan langsung, penulis menyimpulkan aspek yang mendukung pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah yang terletak di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hul adalah pengawasan dari kepala madrasah masih kurang baik, pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar seperti kantor kementerian Agama terutama oleh kepala madrasah itu sendiri. Hal ini dilihat dari pengawasan umumnya hanya dilakukan melalui laporan keuangan yang disusun oleh bendahara, tanpa diikuti pemeriksaan langsung atau inspeksi ke lapangan. Selain itu, pengawasan dari pihak eksternal seperti Kementerian Agama turut hadir, namun belum menjangkau seluruh aspek pelaksanaan secara menyeluruh

SIMPULAN

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal, hal ini dilihat dari : Pertama, terkait subvariabel perencanaan finansial ada tiga indikator yaitu sumber pendapatan sudah optimal karena seluruh pembiayaan operasional madrasah yang sepenuhnya mengandalkan dana BOS dari pemerintah, tanpa merencanakan atau mengandalkan sumber pendapatan lainnya, indikator rencana pengeluaran sudah optimal karena rencana pengeluaran yang disusun berdasarkan RKAS yang telah disahkan dan disepakati dalam rapat, serta seluruh dana BOS digunakan untuk mendukung kebutuhan madrasah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan madrasah, pembayaran honorarium guru, dan kegiatan pembelajaran., dan indikator rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) belum optimal karena terbatasnya dana BOS yang diterima, sehingga beberapa kebutuhan penting madrasah, seperti pembayaran gaji guru honorer dan pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang dalam RKAS, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai perencanaan yang telah disahkan. Kedua, terkait subvariabel pelaksanaan anggaran ada tiga indikator yaitu indikator pelaksanaan pengelolaan anggaran sudah optimal karena kegiatan dan proses pelaksanaan anggaran keuangan sekolah dilakukan dengan baik dan pelaksanaan dilakukan oleh Tim BOS yang di realisasikan sesuai anggaran, dan proses pelaksana oleh Kepala Madrasah, indikator penerimaan sumber dana pemerintah sudah optimal karena madrasah hanya menerima dana operasional dari program BOS yang berasal dari pemerintah pusat, tanpa adanya dukungan dana lain seperti BOSDA atau sumber lainnya dan indikator pengeluaran dana belum optimal karena jumlah dana yang diterima dari pemerintah yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam anggaran. Ketiga, terkait subvariabel evaluasi ada dua indikator yaitu indikator pengawasan belum optimal karena pengawasan internal memang dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai pimpinan tertinggi, namun masih terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan secara berkala tanpa adanya tindakan langsung seperti inspeksi mendadak (sidak) dan indikator

proses evaluasi sudah optimal karena evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dan melibatkan pihak eksternal seperti Kementerian Agama. Di samping itu, beberapa faktor turut memengaruhi manajemen dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor yang mendukung antara lain adalah adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara pihak madrasah dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Adapun kendala utama yang dihadapi ialah belum terwujudnya seluruh perencanaan dalam RKAS akibat keterbatasan anggaran yang diperoleh serta lemahnya fungsi pengawasan dari Kepala Madrasah. Fungsi pengawasan tersebut seyogianya mencakup tindakan konkret, baik dari Kepala Madrasah sendiri maupun pihak eksternal seperti Kantor Kementerian Agama.

Untuk meningkatkan pengelolaan bantuan operasional sekolah (bos) pada madrasah tsanawiyah nurul hidayah kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara maka disarankan :

1. Kepada Kepala Madrasah sebaiknya meningkatkan lebih optimal dalam merencanakan dan mengelola anggaran BOS sesuai dengan juknis yang berlaku. Kepala sekolah perlu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan aktif tim BOS serta komite sekolah dalam setiap proses perencanaan dan pelaporan dana.
2. Kepada Seluruh Guru dan Staf Tata Usaha dan jajarannya sebaiknya lebih aktif memberikan masukan terkait kebutuhan pembelajaran yang bisa didanai BOS serta mendukung pengawasan penggunaan dana agar tepat sasaran. Partisipasi dalam penyusunan RKAS juga perlu ditingkatkan.
3. Kepada Kementerian Agama Daerah untuk lebih mengevaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan dan distribusi dana BOS, khususnya untuk madrasah swasta dengan jumlah siswa sedikit. Kementerian juga diharapkan memberi pelatihan manajemen keuangan kepada kepala sekolah dan bendahara agar pengelolaan dana lebih profesional.
4. Kepada Orang Tua Murid untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya dalam hal pentingnya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Anonim. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomo 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Anonim. (2021). Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Abd. Rohman. (2017). Dasar-Dasar Manajemen. Malang : Inteligencia Media
- Hasbiyallah & Sujudi. (2019). Pengertian Pengelolaan. Dalam buku Dasar- dasar Manajemen. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Henry, Fayol. (2015). General and Industrial management dalam Jurnal Manajemen Strategis, Vol. 1 No. 1 (2023)
- Minarti, Sri. (2017). Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Pasolong, Harbani. 2014. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Penulis Tim. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Starta (S1). Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Purnaridha, Sari. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 1 Pugaan Kabupaten Tabalong. Skripsi STIA Amuntai
- Sinambela, Poltak. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sodang. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksana
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Kedua, Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta
- Suwatno. (2022). PENGANTAR MANAJEMEN: Panduan Pengelolaan Organisasi Di Era Digital. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Wibowo. (2019). Manajemen Dari Fungsi Dasar Ke Inovasi. Depok : PT RajaGrafindo Persada